

RESENSI BUKU

Judul	: Sistem Komunikasi Indonesia
Penulis	: Aripfin A
Penerbit	: Simbiosis Rekatama Media
Tebal Buku	: xiv + 286 hlm
Tahun	: 2011

Nilai-nilai dasar Pancasila menyebabkan Sistem komunikasi Indonesia berbeda dari sistem komunikasi negara-negara lain, baik yang berhaluan liberalisme maupun komunisme. Nilai-nilai tersebut membentuk karakteristik sistem komunikasi tersendiri sehingga ilmu komunikasi di Indonesia, sebagai ilmu sosial yang tidak lepas dari faktor sejarah dan kebudayaan, memiliki karakteristik tersendiri. Perbedaan karakteristik ini menjadi inti bahasan Arifin Anwar, profesor dalam ilmu Komunikasi yang juga malang melintang dalam bidang sosial politik, dalam bukunya yang berjudul “Sistem Komunikasi Indonesia”.

Dalam bagian awal bukunya, Arifin menguraikan tentang kejenuhan penelaahan komunikasi sebagai proses yang berpusat pada komunikator, komunike, komunikan, media dan efek. Sudah seharusnya kajian sistem komunikasi menyentuh seluruh aspek ilmu sosial dalam arti ilmu pengetahuan alam, matematik dan teknik sebagai kekecualian, tetapi tidak didalam aplikasinya. Sebagai penekanan, diuraikan bahwa disiplin ilmu yang perlu dikaji terkait komunikasi adalah sosiologi, ilmu politik (termasuk pemerintahan), antropologi, hukum, ekonomi, sejarah, filsafat, dan etika.

Dari sudut pandang penerapannya, menurut Arifin, pembahasan sistem komunikasi secara umum berbeda dengan pembahasan sistem komunikasi yang dititikberatkan atau dibatasi secara khusus pada kondisi di Indonesia; dengan demikian, pembahasan sistem tersebut bersifat tidak universal. Sifat tidak universal tersebut,

diantaranya ditandai dengan sistem komunikasi Indonesia yang terbagi atas banyak sub-sistem. Oleh karena itu, ditegaskannya bahwa sistem komunikasi di Indonesia harus bermuara pada sistem demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem komunikasi Indonesia ini oleh Arifin disebut sebagai Sistem Komunikasi Pancasila.

Arifin juga menjelaskan dalam bukunya bahwa dalam penerapan kehidupan berbangsa dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dibutuhkan berbagai perundang-undangan sebagai sub-sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Dalam bab lain Arifin menjelaskan bahwa komunikasi publik bersifat terbuka, sehingga diperlukan rambu-rambu yang berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab. Besar kecilnya kebebasan dan tanggung jawab bergantung pada filsafat dan ideologi. Ideologi adalah perkembangan dari akar budaya. Akar budaya terbentuk dari *way of life of nation* (yang bersifat tidak bebas nilai). *Way of live of nation* tumbuh dari *way of life* yang memiliki arti sebagai kumpulan dari adat, agama dan undang-undang yang berpangkal pada norma (*norms*) dan nilai (*values*). Pada buku ini ideologi disetarakan dengan filsafat (sebagai ilmu) & *way of life* sebagai sesuatu yang ada (*exist*) dan sistem ideologi Pancasila telah melahirkan Sistem Komunikasi Pancasila.

Kode Etik Jurnalistik yang merupakan produk dari sistem pers dengan tanggung

jawab sosial (*Social Responsibility Press*). Arifin membahas secara rinci karakteristik pers, kemudian perkembangan dan dinamika serta ro-mantika pers Indonesia, serta rasionalitas dan jati diri pers Pancasila. Sistem pers tanggung jawab sosial digagas oleh pemikir Amerika yang membentuk Komisi Kebebasan Pers (*The Commissioner on Freedom of The Press*) yang diketuai Hutchins (1947) dan dikembangkan oleh Thodore Peterson (1956). Dijelaskan Arifin bahwa di Amerika sendiri penerapan Sistem Pers Tanggung Jawab Sosial telah dipandang gagal karena melahirkan monopoli media, termasuk opini publik. Kegagalan ini memunculkan Sistem Media Demokratik Partisipasi sebagai koreksi terhadap Sistem Pers Tanggung Jawab Sosial yang menekankan organisasi dan isi media untuk tidak tunduk pada pe-ngendalian politik dan ekonomi.

Untuk menjelaskan jati diri bangsa Indonesia diantara sesama bangsa-bangsa di dunia, digunakan istilah Pers Pancasila yang dikembangkan oleh para akademisi di perguruan tinggi dengan nama Teori Pers Pancasila yang bersumber dari filsafat Pancasila yang digagas oleh pendiri bangsa. Arifin melengkapi pemikirannya dengan sejumlah dasar hukum seperti ketetapan MPRS.No.XXXII/MPRS/1966 tentang pembinaan Pers, yang menyebutkan bahwa kebebasan mengeluarkan pikiran di Indonesia melalui pers, harus diimbangi dengan tanggung jawab religius, etika dan tanggung jawab sosial serta tanggung jawab nasional.

Selain masalah pers, buku ini juga menyoroti masalah sistem perfilman di Indonesia yang meliputi karakteristik dan dinamika perfilman nasional serta peran negara dan masyarakat dalam kaitannya dengan perfilman di Indonesia. Arifin menyebutkan perkembangan sistem perfilman Indonesia secara spesifik, yakni Sistem Perfilman Terpimpin dan Sistem Perfilman Pancasila. Menurutnya sistem perfilman di Indonesia dikembangkan berdasarkan ideologi Pancasila dan merupakan ciri jati diri bangsa,

sehingga perkembangan dan pengaturannya terkait erat dengan peran pemerintah dan masyarakat. Dicontohkannya bahwa untuk mencegah terjadinya perusakan etika dan moral masyarakat dibentuk Lembaga Sensor Film yang diawali dengan pembentukan Panitia Sensor Film (1959).

Sistem Penyiaran Indonesia, seperti halnya sub—sistem yang lain dalam Sistem Komunikasi Indonesia - meliputi karakteristik radio dan televisi, dinamika penyiaran nasional dan demokratisasi dan peran serta masyarakat. Walaupun mengalami perkembangan yang sangat pesat sering masuknya pengaruh dari sistem penyiaran negara-negara lain, sistem penyiaran Indonesia tetap menganut keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab dan menunjukkan jati diri bangsa Indonesia dalam pergaulan antarbangsa.

Bagian akhir buku Sistem Komunikasi Indonesia membahas karakteristik sistem komunikasi Indonesia yang, berdasarkan perspektif ideologinya, disebut Arifin sebagai sistem komunikasi Pancasila. Sistem ini merupakan himpunan dari beberapa sub-sistem dan sangat berbeda dari sistem komunikasi otoritarian, sistem komunikasi libertarian, sistem komunikasi komunis, dan sistem komunikasi lainnya. Hal lain yang menarik untuk dikaji dalam buku ini adalah tentang pemilikan pers, film, radio dan televisi yang sangat berkaitan dengan konsep kebebasan pers (*freedom of the press*), kebebasan berbicara (*freedom of speech*), dan kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) yang tercakup dalam kebebasan informasi (*freedom of information*).

Secara umum buku ini bermanfaat untuk mereka yang tertarik dengan masalah perkembangan sistem komunikasi di Indonesia dalam kaitannya dengan filsafat dan ideologi Pancasila beserta nilai-nilai luhur yang dikandungnya serta peraturan-peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh: Nia Kurniasih